

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : POTENSI PEMALSUAN DATA PADA PENGATURAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN
PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
TAHUN 2013**

Identias Penulis :

- a. Nama : ADHYAKSA ABDILLAH**
- b. NIM : 1150100111134**
- c. Konsentrasi : Pidana**

Disetujui pada tanggal : 21 Januari 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, SH., M.Hum.

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP : 19590126198701 1 002

NIP : 19600810198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati , SH., LL., M.

NIP : 19660710199203 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

**POTENSI PEMALSUAN DATA PADA PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2013**

Oleh

ADHYAKSA ABDILLAH

115010100111134

Skripsi ini telah disahkan oleh, pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, SH., M.Hum.

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

NIP : 19590126198701 1 002

NIP : 19600810198601 1 002

Ketua Bagian Hukum

Mengetahui

Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati , SH., LL., M.

Dr. Rachmad Safa'at., SH.,M.Si.

NIP : 19660710199203 2 003

NIP: 19620805198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

- 1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LL., M. selaku Ketua Bagian Pidana.**
- 3. Bapak Abdul Madjid, SH., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan motivasinya.**
- 4. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan kesabarannya.**
- 5. Pihak-pihak lain yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa megampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukan jalan yang benar.

Malang 19 Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan.....	viii
Summary.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan.....	12
B. Asas Pemungutan Pajak	17
C. Sistem Pengenaan Pajak	20
D. Perlawanan Terhadap Pajak	22
E. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	24
F. Tindak Pidana Pemalsuan Data	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Metode Pendekatan	30
C. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisa Data	33
F. Definisi Operasional.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertentangan Pengaturan Terkait Pajak Penghasilan Dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang diterima Atau Diperoleh	
---	--

Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.....	36
B. Potensi Pemalsuan Data Oleh Wajib Pajak Pada Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Jenis Usaha Jasa beserta PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dan PPh terutang berdasarkan PPh Final.....	48
Tabel 2. Perbedaan PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dan PPh Terutang berdasarkan PPh Final.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Perpanjangan SK. Bimbingan Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi

RINGKASAN

Adhyaksa Abdillah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2015,

**POTENSI PEMALSUAN DATA PADA PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2013, Abdul Madjid, SH., M.Hum, Lutfi Effendi, SH., M.Hum.**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Potensi Pemalsuan Data Pada Pemungutan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya peraturan pemerintah terkait pengenaan tarif pajak penghasilan yang menyalahi pengenaan tarif pajak penghasilan berdasarkan UU PPh yakni UU no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan mengakibatkan potensi tindak pidana pemalsuan data dalam UU no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan oleh wajib pajak tertentu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah Pengaturan terkait pajak penghasilan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bertentangan dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (2) Apakah terdapat potensi pemalsuan data oleh wajib pajak pada pengaturan pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis adalah metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari peraturan perundang-undangan terkait dan literatur serta pendapat ahli hukum pidana terkait yang dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Yakni terdapat potensi tindak pidana pemalsuan data oleh wajib pajak tertentu akibat diterbitkannya PP nomor 46 tahun 2013.

Pemalsuan data perpajakan berbeda dengan tindak pidana Pemalsuan surat dan dokumen dalam KUHP. Selain tindak pidana pemalsuan data tersebut diatur dalam ketentuan UU no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan memiliki sanksi pidana tersendiri, tindak pidana pemalsuan data memiliki unsur tindak pidana yang berbeda dengan pemalsuan surat dan dokumen dalam KUHP. Dapat dikatakan tindak pidana pemalsuan data perpajakan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam KUP.

Selama ini penetapan tarif PPh harus berdasarkan Undang-undang dan mengatur secara spesifik jenis penghasilan tertentu yang dikenai pajak. Untuk kali pertama terbit suatu peraturan yang mengatur tentang tarif PPh untuk kelompok penghasilan tertentu berdasarkan PP yakni PP no 46 tahun 2013.

Potensi tindak pidana pemalsuan data dapat terjadi akibat penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan PP no 46 tahun 2013 tidak rasional untuk beberapa jenis usaha. Iklim usaha yang semakin buruk akibat belum siapnya Indonesia menghadapi AFTA (*Asean Free Trade Area*) tentu juga berdampak pada potensi pemalsuan data oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak.

SUMMARY

*Adhyaksa Abdillah, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, June 2015,
POTENTIAL DATA FORGERY IN SETTING OF COLLECTION IN INCOME TAX UNDER
ARTICLE 2 PARAGRAPH (1) OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 YEAR 2013,
Abdul Madjid, SH., M.Hum, Lutfi Effendi, SH., M.Hum.*

In this thesis, the author discussed about potential data forgery in setting of collection in income tax under article 2 paragraph (1) of government regulation number 46 year 2013. The background of this case is existence of government regulation which is related with tax fare which is infringing tax fare based on Income Tax Law, its Law Number 36 year 2008 On Tax Income and can involve a potential crime of data forgery in Law Number 16 year 2009 on General Provision of Taxes by specific taxpayer.

Base on that background of issue, this thesis lift formulation of problem : (1) does the regulation of income tax form government regulation number 46 year 2013 about Income Tax From Business Income which is get or obtained by Taxpayer who have Specific Gross distribution have conflict with Law number 36 year 2008 about Income Tax? (2) is it any Potential crime of data forgery cause by existence of Tax Setting From article number 2 Paragraph (1) of Government Regulation Number 46 Year 2013?

In order to answer those issue, the type of research used is Normative legal research through statue approach and conceptual approach as its method. Legal material there are Primary, secondary, tertiary data which obtained are analyzed with descriptive analysis technique. descriptive analysis technique is a method to analyze legal materials by determine the content or meaning of regulation form law, literature and criminal law expert opinion related used for reference to answer the issue which become studies object.

From research result using method above, author obtain the answer for issue. The issue is potential criminal act of data forgery occur by certain taxpayers as a result of the issuance from government regulation number 46 of 2013.

Tax data forgery is difference with forgery of letters and document criminal act in KUHP. Aside tax data forgery criminal act regulated in Law number 16 year 2009 about Common regulation tax and have its own criminal sanction, tax data forgery have criminal unsure which is difference

with letter and document forgery criminal act in KUHP. As it can says, tax data forgery is a specific criminal act which is regulated in Common regulation of taxes law.

The Potential of tax data forgery criminal act can be occur from setting of tax fare based on Government regulation number 46 year 2013 which is illogical for some kind of business . Economy climate which is getting worse cause by Indonesia not ready facing AFTA (Asean Free Trade Area) of course can be an impact to The Potential of tax data forgery criminal act by Taxpayer for purpose decreasing their tax cost.

In past, the implementation of income tax fare must be based on Law and specifically regulating specific kind income for tax fare. For the first time rise a regulation which regulate about income tax fare for group of specific amount of income based on regulation of government nd its Government regulation number 46 year 2013.

The Potential of tax data forgery criminal act can be occur because of implementation of income tax fare based on government Regulation number 46 year 2013 is illogical for some kind of business. Economy climate which is getting worse because of Indonesia not ready facing AFTA of course, have an impact to The Potential of tax data forgery criminal act by Taxpayer for decreasing their Tax fare.